

Perilaku Elite Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Kota Medan

Annai Saburi^{1*}, Atikah Asna¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*annaisaburi@uinsu.ac.id

Abstract: The objectives of this research are 1) to find out the process of formation and power of Muhammadiyah elites, 2) to analyze the motives of Muhammadiyah elites' political behavior in responding to political developments and finally to map the political behavior of Muhammadiyah elites in responding to the developing actions related to direct elections. In this study, researchers used field research, library research, and documentary study. The main sources of this field research are leaders, Muhammadiyah regional leaders, and Muhammadiyah cadres who are active in political parties. While the main source of library research is obtained from various references, including the main source, and supporting sources. Primary sources are obtained from references that discuss the major themes of the title of this research, namely all scientific works that are closely related to the research problem. While supporting sources are obtained from books that discuss minor themes that have to do with this research. The researcher's findings in this study are related to the organization Although Muhammadiyah is not a political organization, its movement in the political field can show its role as a movement of morality and responsibility as a citizen in the political empowerment of the Medan community. In addition to movements that are displayed outward, namely to society and government, Muhammadiyah also displays its attitude to its citizen communities, such as in the fields of education, da'wah, social, and economy. This is sought to formulate Islamic teachings sourced from the Koran and As-Sunnah so that they are easily practiced in society and as a logical consequence that Muhammadiyah as a tajdid movement is able to carry out political ijtihad based on the Islamic spirit.

Keywords: Behavior; Muhammadiyah Elite; Community Politics

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui proses Pembentukan dan kekuasaan Elite Muhammadiyah, 2) untuk menganalisis motif Prilaku politik Elit Muhammadiyah dalam menanggapi perkembangan Politik dan yang terakhir untuk memetakan Prilaku politik Elit Muhammadiyah dalam menanggapi tindakan-tindakan yang berkembang terkait dengan Pemilihan langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian riset lapangan, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Yang menjadi sumber utama penelitian lapangan ini adalah para tokoh, pimpinan daerah Muhammadiyah, dan kader Muhammadiyah yang berkiprah di partai politik. Sedangkan sumber utama penelitian studi kepustakaan diperoleh dari berbagai referensi, meliputi sumber utama (*key referens*), dan sumber pendukung. Sumber utama diperoleh dari referensi-referensi yang membicarakan tentang tema-tema mayor dari judul penelitian ini, yakni seluruh karya ilmiah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Sedangkan sumber pendukung diperoleh dari buku-buku yang membahas tema-tema minor yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Temuan peneliti dalam penelitian ini menyangkut dengan organisasi Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik akan tetapi gerakannya dalam bidang politik ternyata dapat menunjukkan perannya sebagai gerakan moralitas dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam pemberdayaan politik masyarakat kota Medan. Selain gerakan yang ditampilkan ke luar yakni kepada masyarakat dan pemerintah, Muhammadiyah juga menampilkan sikapnya kepada komunitas warganya, seperti bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Hal ini diupayakan untuk menformulasikan ajaran Islam yang bersumber Alquran dan As-Sunnah sehingga mudah diamalkan di masyarakat dan sebagai konsekuensi logis bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang mampu melakukan ijtihad politik yang dilandasi oleh ruh keislaman

Kata kunci: Perilaku; Elite Muhammadiyah; Politik Masyarakat

History Article: Submitted 16 January 2023 | Revised 29 June 2023 | Accepted 10 July 2023

How to Cite: Nasution, A., & Asna, A. (2023). Perilaku Elite Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol 11 (1), pp. 21–29. DOI: <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v11i1.14548>



© the Author(s) 2023

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Pendahuluan

Ormas keagamaan sebagai lembaga non-Pemerintah merupakan institusi yang menjadi kekuatan penyeimbang, untuk melakukan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat, membangun kekuatan sosial politik. Ketika organisasi politik formal belum memainkan peran yang memadai dalam melakukan penyeimbangan kekuasaan (*balance of power*) maka institusi-institusi masyarakat yang terlahir dari dan untuk masyarakat bisa minimal untuk sementara waktu, menggantikan posisi orpol dalam membangun posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat.

Berakhirnya rezim otoriter, secara otomatis meminta kehadiran yang sebesar-besarnya peran partai-partai politik yang secara hakiki merupakan representasi politik masyarakat (Arbi, 2002). Namun realitasnya tugas partai politik dimaksud belum terwujud sebagaimana yang menjadi tuntutan. Partai-partai politik yang ada dalam banyak hal masih terfokus pada upaya konsolidasi internal dan perebutan kekuasaan yang diyakini sebagai tahapan kunci dalam membangun kekuatan dan masa depan partai. Di hadapan partai politik, masyarakat terkesan hanya diposisikan sebagai objek mobilisasi untuk kepentingan parpol itu sendiri.

Belum berfungsinya parpol sebagaimana seharusnya menghendaki adanya kekuatan alternatif, dan organisasi sosial serta LSM secara historis telah memperlihatkan fungsi alternatifnya dalam melakukan hal itu. LSM dan Ormas, ormas keagamaan khususnya telah memposisikan diri sebagai kekuatan masyarakat yang mampu membangun posisi tawar (*bargaining position*) politik masyarakat di hadapan negara.

Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat bahwa organisasi Islam merupakan representasi dari umat Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia. Hal ini menjadikan organisasi Islam menjadi sebuah kekuatan sosial maupun politik yang diperhitungkan dalam pentas politik di Indonesia. Dari aspek kesejarahan, dapat ditangkap bahwa kehadiran Organisasi-organisasi Islam baik itu yang bergerak dalam bidang politik maupun organisasi sosial membawa sebuah pembaruan bagi bangsa, seperti kelahiran Serikat Islam sebagai cikal bakal terbentuknya organisasi politik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, al-Jam'iyah al-Washliyah, Tarbiyah Islamiyah, Syarikat Dagang Islam, dan lain-lainnya pada masa prakemerdekaan membangkitkan sebuah semangat pembaruan yang begitu mendasar di tengah masyarakat.

Dengan demikian, lembaga keagamaan yang ada di Kota Medan juga beragam. Namun, lembaga keagamaan ini selain sebagai referensi keberagamaan juga dalam konteks tertentu justru sebagai pensosialisasi politik tertentu. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga keagamaan memang tidak dapat memisahkan diri dari tarik menarik kepentingan dengan segala bentuk politik karena hal demikian berkaitan langsung dengan keberadaan lembaga keagamaan tersebut.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis yang berbasis urban/kota, pedagang atau pegawai, sedangkan ormas lainnya mewakili kubu tradisional pedesaan, agraris, dan pesantren (Suwarno, 2001). Perubahan peta politik nasional pasca tumbangannya kekuasaan Soeharto rezim orde baru, atau lazimnya disebut era reformasi tahun 1998 membuka harapan politik baru bagi seluruh rakyat dan kekuatan politik Indonesia. Termasuk didalamnya Muhammadiyah kekuasaan rezim orde baru dipinggirkan secara. Melihat elit Muhammadiyah di kota Medan memiliki Naluri politik yang cukup kental misalnya dalam pemilihan kepala daerah elit Muhammadiyah selalu mendapat perhatian khusus dari para elit Partai politik bahkan para calon kepala daerah berusaha mengadakan pendekatan karena elit organisasi dianggap memiliki peran yang sangat menentukan dalam mengarahkan warganya untuk mendukung salah satu Partai politik atau calon yang ingin maju ke pentas demokrasi.

Oleh sebab itu meneliti Prilaku Politik ormas Islam di kota Medan cukup menarik mengingat ormas Islam di kota Medan memiliki latar belakang budaya yang sangat plural dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang sangat peduli dan responsif terhadap persoalan bangsa dan negara atau politik. Dalam penelitian ini penulis mencoba menelaah bagaimana sebenarnya Prilaku Politik elite Muhammadiyah kota Medan.

Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara



langsung. Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih pemimpin mereka. Semangat pemilihan kepala daerah secara langsung adalah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di daerah masing-masing sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya.

Sejak saat bergulirnya PILKADA terbukalah lembaran baru dalam demokrasi di tanah air. PILKADA pertama kali dilaksanakan pada bulan juni 2005, sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PILKADA dimasukkan dalam rezim PEMILU, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Peserta Pilkada berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal.

Adanya ketentuan peserta Pilkada hanya dapat ditentukan ataupun dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, hal ini akan menutup hak konstitusional calon perseorangan (*independen*) dalam pilkada. Setelah mengadakan uji materiil, pada tanggal 23 juni, mahkamah konstitusi menyatakan sebagian pasal dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (*independen*) dalam Pilkada bertentangan dengan UUD 1945. Suatu negara dapat dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan prefensi-prefensi politik mereka melalui jalur- jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang berkompetisi untuk jabatan politik.

Jika telah mengetahui apa yang jadi penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, maka akan lebih mudah melakukan pencarian solusi terhadap fenomena yang ada sesuai dengan judul yang ada diatas. Sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi tertentu, Ormas dan Partai Politik juga sangat berpengaruh pada kesadaran politik masyarakat. Kegamangan masyarakat terhadap mekanisme pemilu langsung sedikit banyaknya akan berpengaruh juga pada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Unsur-unsur mengenai sejauh mana tingkat partisipasi langsung masyarakat, yang didorong melalui sistem Pemilihan langsung dan kredibilitas calon yang lahir serta berbanding dengan fenomena GOLPUT, hal ini juga terdapat di dalam bentuk pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2010. Objek penelitian yang kedepannya akan diteliti oleh peneliti, untuk melihat Peranan politik ormas Islam pada pemilihan walikota Medan.

Digelarnya model pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung embawa dampak serius terhadap peranan ormas Islam khususnya Muhammadiyah di tingkat lokal di kota Medan, para aktor politik lokal tiba-tiba mendapatkan arena bermain cukup luas untuk menyalurkan bakat politik mereka secara bebas. Tentu masih banyak yang teragap dengan perubahan ini. Termasuk ormas Islam Muhammadiyah yang relatif belum siap mensikapi terbukanya kesempatan ini. Tampilnya parakandidat calon kepala daerah di arena pilkada langsung, pada akhirnya harus menyeret berbagai kekuatan elit lokal yang memiliki basis massa yang kuat. Organisasi keagamaan menjadi ladang potensial untuk direbutkan para kandidat kepala daerah (Bupati, Walikota, maupun Gubernur).

Kegagalan ormas Islam di tingkat lokal terlihat dengan terjadinya pola-pola koalisi yang melibatkan ormas agama dalam kekuatan politik dengan ideology yang sangat berbeda. Hal ini mencerminkan ketidak pastian politik elit. Ketika organisasi politik formal belum memainkan peran yang memadai dalam melakukan penyeimbangan kekuasaan (*balance of power*) maka Muhammadiyah sebagai lembaga non-Pemerintah diharapkan dapat menempati posisi sebagai kekuatan penyeimbang, juga memiliki kemampuan untuk melakukan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat, membangun kekuatan politik masyarakat dalam membangun posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat. Penelitian ini bermaksud menelaah peranan Muhammadiyah dalam pemberdayaan politik Masyarakat kota Medan

Metode

Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*), dan studi kepustakaan (*library research*), dan studi dokumen (*documentary study*), maka sudah barang tentu yang menjadi sumber utama penelitian lapangan ini diperoleh dari informan kuncinya (*key persons*) dari para tokoh, Pimpinan daerah ormas keagamaan Muhammadiyah, kader-kader yang berkiprah pada partai politik. Sedangkan sumber utama penelitian studi kepustakaan (*library research*), dapat diperoleh dari berbagai referensi, meliputi sumber utama (*key referens*), dan sumber pendukung. Sumber utama (*primer*) diperoleh dari referensi-referensi yang membicarakan tentang tema-tema mayor dari judul penelitian ini, yakni seluruh karya ilmiah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Sedangkan sumber pendukung (*sekunder*) diperoleh dari buku-buku yang membahas tema-tema minor yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sumber yang ketiga penelitian ini adalah studi dokumen (*documentary study*) Dalam pelaksanaannya diarahkan pada upaya mempelajari dokumen yang terdapat pada organisasi sosial keagamaan yang berkaitan dengan peranannya dalam pembangunan politik di kota Medan.

Hasil dan Pembahasan

Berdirinya Muhammadiyah pada awalnya di wilayah perkotaan, kemudian MH berkembang pedesaan Sumatera Utara. Alasannya, karena masyarakat kota lebih bersifat akomodatif, cara berpikirnya rasional dan maju. Para pendirinya bukanlah para raja, sultan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal atau masyarakat melayu tetapi masyarakat pendatang yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Barat dan Jawa. Chalidjah Hasanuddin menyebutnya. mubalig-pedagang (Hasanuddin, 1988). Karena itu, yang menerima kehadiran paham Muhammadiyah secara terbuka juga masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah perkotaan. Ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya.

1. Masyarakat Sumatera Utara sejak dahulu terkenal dengan masyarakat religius, taat beribadah, fanatik terhadap agama yang dianutnya dan menganut mazhab Imam Syafi'i, Ahlu sunah wa al-Jamaah.
2. Kedua, cukup kuat mengamalkan tradisi keagamaan seperti do'a bersama, zikir bersama, tahlilan ketika meninggal dunia, marhaban atau berjanji, tepung tawar, upah-upah dan upacara selamatan.
3. Memegang teguh adat iatiadat yang diwarikan oleh nenek moyang secara turun temurun yang sulit dihilangkan.

Merujuk kepada beberapa alasan itu pula, kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Utara banyak menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Sikap pro artinya menerima secara terbuka pemahaman agama yang dianut dan diaampaikan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Sikap kontra, artinya tidak setuju terhadap paham keagamaan Muhammadiyah yang banyak menyinggung masalah-masalah budaya yang sejak lama mengakar dan diwariai masyarakat secara turun temurun. Mengutip penjelasan Kalimun Sunar hampir tidak ada masyarakat lokal yang menerima kehadiran Muhammadiyah kecuali di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat sekarang (Sunar, 1990).

Dengan alasan bahwa masyarakat Bahorok tergolong masyarakat terbuka, toleran dan tidak anti terhadap setiap paham keagamaan. Walaupun pada awalnya, banyak sikap yang menolak terhadap kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Utara, namun tidaklah mengurangi semangat para pendiri untuk memperkokoh dan mengembangkan dakwah Muhammadiyah, memacu semangat yang kuat tanpa lelah untuk mensosialiasikan Muhammadiyah di berbagai daerah, kabupaten dan kota. Sebagai hasilnya, sikap masyarakat semakin melunak, terbuka, toleran dan lebih bersahabat terhadap Muhammadiyah.

Selain sikap yang lebih toleran, didukung juga oleh faktor pemuda setempat yang banyak belajar ke Sumatera Barat dalam bidang agama sekalipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Namun, setelah pulang ke kampung halaman maka merekalah yang mengembangkan Muhammadiyah secara intens. Versi lain seperti yang dijelaskan oleh Aman Sari bahwa pengembangan paham Muhammadiyah merupakan upaya gabungan antara ulama lokal maupun ulama pendatang yang secara bersama-sama menyampaikan pembaruan pemahaman agama Islam (Sari, 2022).

Terlepas dari dua versi yang berbeda itu, penyampaian ide Muhammadiyah di sini masih berupa paham belum secara lembaga atau persyarikatan. Materi dakwah Muhammadiyah awal seputar masalah bid'ah, khurafat dan takhayul yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam seperti kenduri ketika kematian, talqin di kuburan, membaca yasin di kuburan, tidak boleh membayar fidiyah salat dan puasa, tepung tawar, memberi upah membaca Alquran di atas kuburan, dan marhaban (Sunar, 2009).

Materi dakwah ini bagaimanapun juga dalam penilaian masyarakat lokal bertentangan dengan tradisi keagamaan sehingga banyak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Karena tradisi keagamaan itu dipandang masyarakat sebagai syariat Islam, hadis-hadis nabi dan kultur yang telah dikembangkan oleh ulama-ulama tradisional. Ulama dalam persepsi masyarakat adalah orang yang harus dihormati, baik dari segi perkataan dan perbuatannya. Bagi kalangan Muhammadiyah praktek tradisi keagamaan itu tidak pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw dan tidak pula ditemukan dalilnya dalam kitab hadis-hadis sahih. Kedua argumentasi tersebut sulit mencari titik temu dan masing-masing pihak merasa benar terhadap argumentasinya.

Argumentasi yang dikemukakan ulama Muhammadiyah terutama oleh H. Bustami Ibrahim (almarhum) diakui oleh kalangan tradisional tingkat keakuratan, dan kebenarannya serta orang yang menyampaikan tidak diaangsikan kapasitasnya sebagai seorang ulama yang alim dan memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama. Walaupun demikian, pembaruan pemahaman agama yang digagasnya masih sulit diterima dan masyarakat tidak berubah kultur pemahaman agamanya. Karena itu, kekaguman masyarakat terhadap paham Muhammadiyah bukanlah dalam bidang pembaruan pemahaman agama dan dalil-dalil yang sahih tetapi lebih mengagumi ketertiban administrasi maupun manajemen organisasinya.

Berkaitan dengan sulitnya merubah tradisi keagamaan, Kalimin Sunar mengatakan bahwa untuk merubah pemahaman keagamaan masyarakat tidaklah dengan kata-kata yang bersifat konvensional tetapi dengan menanamkan ilmu pengetahuan agama dengan benar, mengemukakan argumentasi yang kuat, akurat dan rasional sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengetahui kesalahan-kesalahan di dalam memahami agama. Bentuknya yaitu melalui dunia pendidikan berupa pendirian sekolah atau madrasah bukan melalui dakwah maupun ceramah agama semata.

Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1927 menjadi daya dorong bagi pengurus untuk merekrut anggota maupun simpatisan dalam rangka memperkokoh dukungan terhadap eksistensi organisasi yang baru berdiri tetapi sayang tidak diketahui secara pasti jumlah anggota pada waktu itu. Bagi Muhammadiyah dukungan moral dan materil jauh lebih penting untuk kelancaran roda organisasi yang baru saja berdiri. Ternyata semakin hari jumlah keanggotaan Muhammadiyah semakin bertambah terutama dari kalangan para pedagang dan perantau yang berasal dari Sumatera Barat. Yogyakarta atau Jawa dan Tapanuli dalam hal ini masyarakat Mandailing.

Bergabungnya H.R.Harahap M. Said pada tahun 1923 sebagai anggota Muhammadiyah memberikan semangat baru dan cukup strategic, karena diharapkan anggota Muhammadiyah bukan saja dari kalangan masyarakat pedagang-mubalig, perantau dan kelompok bawah tetapi dari kalangan tokoh masyarakat yang punya pengaruh. Gagasan maupun inisiatif yang dimiliki oleh Mas Pono dan Sutan Juin dinilai cukup cerdas dan brilian. Sebagai hasilnya, anggota bertambah, hubungan antara Medan dan Yogyakarta semakin lancar dan berdiri pula cabang Muhammadiyah di Pematang Siantar yaitu pada tahun 1930.

Sejalan dengan perkembangan Muhammadiyah yang cukup pesat, kepengurusan Muhammadiyah juga turut direformasi yang dulunya dijabat oleh Mas Pono digantikan oleh H.R.Harahap M.Said sebagai ketua. Posisi Mas Pono sebagai sekretaris, Kari Suid dan Sutan Juin sebagai anggota. Pergantian kepengurusan ini tidaklah ada kaitannya dengan unsur politia tetapi semata-mata untuk memperlancar hubungan antara Medan dan Yogyakarta. Di samping itu, untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Sebagai hasilnya, pada 1 Juli 1928 Muhammadiyah di Sumatera Utara diakui secara resmi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, dengan alamat di Nagapatamatraat, Jalan Kediri, Kampung Keling sekarang.

Setelah ada pengakuan resmi, maka kegiatan-kegiatan dakwah Muhammadiyah semakin intensif dan meningkat yang dulunya terbatas di kalangan pedagang dan anggota saja tetapi sudah merambah kepada masyarakat umum. Artinya, keberanian melaksanakan dakwah secara terbuka karena ada pengakuan resmi, dan Sultan Deli juga sebagai penguasa daerah Sumatera Timur memberi dukungan moril, dan memberikan sebidang tanah untuk pengembangan Muhammadiyah. Tetapi dukungan itu tidaklah sertahan lama, artinya sikap sultan mengalami perubahan yaitu ketika dakwah Muhammadiyah memasuki wilayah kesultanan secara struktural. Ia melarang kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah sehingga terjadi konflik antara kesultanan dan Muhammadiyah yang berkepanjangan.

Melihat kondisi yang tidak menguntungkan bagi Muhammadiyah, Muhammadiyah jelas tidak fokus pada wilayah dakwah struktural saja, namun, berupaya menambah kegiatan-kegiatan dakwah di masyarakat, seperti tabligh yaitu dengan memanfaatkan da'i-da'i lokal dan juga mengundang para da'i dari luar terutama dari Sumatera Barat. Para da'i tersebut antara lain-Ilyas, Marah Zainun, Sutan Pamuncak, H. A. Karim dan Thaib

Merujuk kepada perkembangan Muhammadiyah tersebut di atas, maka dielururh Indonesia dilakukan perubahan daerah Konsul menjadi wilayah dan daerah. Daerah Deli Serdang menjadi Daerah Deli Serdang, daerah Kabupaten Langkat menjadi Daerah Kabupaten Langkat. Daerah Kabupaten Asahan menjadi Daerah Kabupaten Asahan yang diketuai oleh Pimpinan Daerah. Demikian seterusnya di wilayah Sumatera Utara. Khusus di wilayah kota Medan menjelang perubahan dari eks keresidenan Sumatera Timur menjadi Sumatera Utara pernah pula dibentuk struktur pimpinan dengan nama Badan Koordinasi Pimpinan Muhammadiyah Daerah tingkat II Medan, (BKPM Medan) yang diketuai oleh Kapten Muchtar Kamil.

Kemenangan yang diperoleh para kader Muhammadiyah pada kenyataannya tidak direalisasikan karena di dalam tubuh partai terjadi konflik kepentingan politik, dan perebutan kekuasaan antara yang pro terhadap Muhammadiyah dan kelompok yang tidak simpatik terhadap Muhammadiyah. Konflik kepentingan ini lebih berpihak kepada kelompok yang tidak suka pada persyarikatan Muhammadiyah yang pada akhirnya berdampak pada pergantian pengurus di tingkat pusat, ketua yang mulanya dijabat oleh Jarnawi Hadikusuma digantikan oleh H. Jailani Naro, berasal dari organisasi Al-Jam'iyatul Washliyah. Pada tingkat propinsi Sumatera Utara, ketua dijabat oleh H. Zainal Arifin Abbas, dari Al-Ittihadiyah. Perubahan kepemimpinan juga terjadi pada setiap pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting se-Sumatera Utara. Mengutip Haedar Nashir pergantian itu bukan sebatas pergantian kepemimpinan biasa tetapi lebih cenderung kepada bentuk kudeta dalam tubuh Parmusi.

Permasalahan yang dihadapi oleh para kader Muhammadiyah merupakan pengalaman yang cukup berharga. Pada satu sisi ingin membangun partai Islam yang kokoh secara politik, saluran aspirasi, perekat ukhuwah Islam dan sarana solidaritas umat. Tetapi pada sisi lain, politik dijadikan sebagai alat untuk memecah kepentingan umat dan lebih mendahulukan kepentingan golongan dari pada kepentingan umat. Melihat fenomena ini, maka kader Muhammadiyah secara sadar dan hormat menarik diri dari lingkungan politik praktis dan lebih fokus membangun kekuatan politik melalui organisasi dan menyatakan Muhammadiyah bukan partai politik, tetapi organisasi gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid*.

Terlepas dari persoalan politik tersebut di atas, Muhammadiyah semakin fokus untuk mensukseskan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke V tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 1970 di Medan merupakan kewajiban organisasi, sekalipun Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi otonom tidak berada di bawah naungan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Karena itu, pada Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ke III tanggal 21-23 Pebruari di Padang Sidimpuan kegiatan Pemuda Muhammadiyah didukung sepenuhnya. Sebagai hasilnya, Muktamar berjalan dengan lancar, tokoh-tokoh senior Muhammadiyah secara aktif membantu dan tanpa pamrih. Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang hadir antara lain : H.M.Bustami Ibrahim, N.D Pane, Munir Naamin, T.A. Lathief Rousycky, Kalimin Sunar, Rasyimah Ilyas. Ketua panitia pelaksana muktamar ialah O.K.M. Kamil Hisyam yang sekaligus ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara. Pusat kegiatan dilaksanakan di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jalan Sutriano Nomor 55 Medan. Selain tokoh senior Muhammadiyah yang hadir, juga dihadiri oleh Mayjen Ahmad Tahir, Pangkolwilhan I Sumatera Utara, Marah Halim Harahap, gubernur Sumatera Utara, Komodor Udara Sutoyo, Pangkodau Sumatera, Utara, dan Syurkani, Wali Kota Medan.

Tugas pengamanan langsung dikendalikan oleh Mayor Munir Naamin, pasukan Kokam Muhammadiyah Sumatera Utara.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf harus mampu memainkan peran politik. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik menurut Din Syamsuddin bermula dari penghadapan Muhammadiyah dengan persoalan-persoalan politik yang merupakan suatu keniscayaan. Keniscayaan ini menurutnya disebabkan oleh kenyataan bahwa pencapaian suatu cita-cita non politis sekaligus tidak mungkin tanpa melakukan kegiatan politik (politicking)³¹. Kegiatan politik disini dimaksudkan adalah alokatif, bukan politik praktis seperti keterlibatan Muhammadiyah dalam pemilihan umum dan perwakilan anggota di lembaga legislatif. Makna katapolitik sendiri dapat diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu:

1. Politik adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang "theory of the state", cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dan sebagainya;
2. Segala kebijaksanaan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. Dalam soal ini didapatkan kata dari bahasa Arab yang telah dipakai dalam bahasa Indonesia dalam arti yang sama yaitu "siasat". Dalam arti demikian itu kata politik atau siasat itu sangat luas jangkauannya dan pemakaiannya. Sebab "politik" yang demikian ini dipakai dalam segala tindak tanduk manusia. Kebijaksanaan atau hikmat ini adalah jalan hidup manusia untuk mencapai sasarannya dengan cara baik yang menguntungkan dan tidak akan merugikan Allah didalam kitab suci Al-Qur'an berfirman, yang artinya: "Serulah kejalan Allah dengan bijaksana dan nasehat yang baik. Dan berdiskusilah dengan mereka melalui cara yang lebih baik Sesungguhnya Tuhanmulah yang lebih mengetahui orang yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An-Nahl:125)
3. Tipu muslihat kelicikan akal dan daya upaya. Dalam arti ini "politik" itu dituduh sebagai perbuatan yang kotor, keji dan tidak layak. Selanjutnya menurut Fuad Fahrudin, apa yang dikerjakan manusia dewasa ini memang memberi arti demikian kejam. Baik itu "politik nasional" apalagi "politik internasional" baik dimasa damai apa lagi dimasa perang. Dalam hal ini seorang negarawan Inggris mengatakan sebagaimana dikutip Fuad Mohd. Fachruddin: "*We have no permanent friends. We have no permanent enemies. We have permanent interest*". Artinya: "Kami tidak mempunyai teman yang tetap abadi. Kami tidak pula mempunyai musuh yang tetap abadi. Kami hanya mempunyai kepentingan yang kekal abadi.

Amin Rais dalam bukunya "Moralitas Politik Muhammadiyah" bahwa Muhammadiyah tidak akan pernah terjun kedalam kancah power politics yang dapat membahayakan kelangsungan hidupnya. Bermain langsung atau sekedar menjadi pion kekuatan-kekuatan eksternal dalam gelanggang politik praktis, tidak pernah terbayang dalam pikiran Muhammadiyah. Sejauh yang diketahui Amin Rais mengapa Muhammadiyah tidak gampang retak dan tidak mengalami polarisasi didalam dirinya dikarenakan politik praktis itu dijauhinya. Namun sekaligus disadari bahwa high politics tetap harus dijalankan sesuai dengan semboyan amar ma'ruf nahi munkar, penyeru pada kebajikan dan mencegah keburukan dan kejahatan.

Dengan begitu ada dua istilah politik yang merupakan corak politik Muhammadiyah, pertama politik alokatif dan kedua high politics. Kedua corak ini pada hakikatnya sama yakni bagaimana mengaktualisasikan politik amar ma'ruf nahi munkar sehingga misi dakwah Muhammadiyah dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Dalam pandangan Muhammadiyah, kata Amin Rais, sesungguhnya ada hubungan organisasi antara dakwah dan politik. Dalam banyak hal kelancaran dakwah dan syiar Islam ditentukan oleh payung politik yang ada. Bila payung politik tidak melindungi kelancaran dakwah, organisasi seperti Muhammadiyah dapat merasa kepanasan atau kedinginan.

Satu hal Amin Rais tidak sependapat dengan Dr. Sulastomo adalah pandangannya di dalam rangka penataan nasional, apakah justru tidak sebaiknya kita memegang disiplin bekerja sesuai dengan sifat dan fungsi organisasi sosial, silahkan beramal sebanyak-banyaknya. Sekilas pandangan ini bagus, tapi bermasalah. Muhammadiyah dalam menghadapi politik kenegaraan memiliki satu sikap dan prinsip bahwa setiap persoalan politik kenegaraan, mengembangkan satu sistem pendekatan dakwah bil hikmah dengan memanfaatkan seluruh politik yang ada,

sehingga berbagai produk politik kenegaraan lebih memberikan peluang bagi pencapaian tujuan dakwah yang seluas-luasnya.

Berdasarkan pengalaman sejarah Muhammadiyah seperti disebutkan diatas maka paling tidak ada dua implikasi terhadap peran politik Muhammadiyah: Pertama; bahwa Muhammadiyah telah melalui political test artinya tes politik dalam keterlibatan Muhammadiyah sebagai organisasi dan keterlibatan anggota pimpinan Muhammadiyah Kedua, bagi Muhammadiyah untuk memainkan peran politik secara efektif tidak harus dilakukan melalui partai politik, akan tetapi dapat juga melalui organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah ini. Sebagai contoh dapat dikemukakan keterlibatan dua orang tokoh Muhammadiyah yaitu: Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun, masing-masing sebagai ketua umum dan sekretaris umum Parmusi.

Keterlibatan Muhammadiyah dalam Parmusi sebenarnya hampir sama dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam Masyumi, yakni "keterlibatan formal" melalui pemberian legitimasi dan representasi organisasi kendati yang duduk dalam Parmusi adalah perorangan". Meskipun tidak terdapat hubungan organisatoris antara Parmusi dengan Muhammadiyah namun ketika terjadi pergolakan internal dalam partai Parmusi sedikit banyaknya memberikan implikasi negatif terhadap Muhammadiyah diantaranya Muhammadiyah menghabiskan energi dalam menghadapi kemelut itu sehingga tidak secara optimal menjalankan program kerja yang bernilai politik alokatif.

Muhammadiyah dalam menyikapi perkembangan politik tersebut melalui salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah di Ujung Pandang tahun 1969 menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik. Hal ini disebabkan pengalaman pahit Muhammadiyah sendiri untuk "memurnikan" jati dirinya sebagai gerakan dakwah. Menurut Din Syamsuddin dalam hal ini terdapat sesuatu yang bisa disebut dengan pemikiran politik: Dengan begitu dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah lulus dalam ujian politik, namun selanjutnya mencoba kembali muncul suatu gagasan dari tokoh Muhammadiyah diantaranya Lukman Harun dan Rusdji Hamka untuk berusaha menghidupkan kembali Partai Islam Indonesia (PII), namun rencana serupa tidak pernah menjadi kenyataan

Kesimpulan

Muhammadiyah dalam sepanjang sejarahnya telah menampilkan diri sebagai sebuah organisasi yang menampilkan fenomena unik dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah mendasarkan gerakannya pada dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar beraqidah Islam yang bersumber Alquran dan As-Sunnah. Meskipun Muhammadiyah bukan organisasi politik akan tetapi gerakannya dalam bidang politik ternyata dapat menunjukkan perannya sebagai gerakan moralitas dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam pemberdayaan politik masyarakat kota Medan.

Selain gerakan yang ditampilkan ke luar yakni kepada masyarakat dan pemerintah, Muhammadiyah juga menampilkan sikapnya kepada komunitas warganya, seperti bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi. Hal ini diupayakan untuk menformulasikan ajaran Islam yang bersumber Alquran dan As-Sunnah sehinggamudah diamalkan di masyarakat dan sebagai konsekuensi logis bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid yang mampu melakukan ijti-had politik yang dilandasi oleh ruh keislaman.

Daftar Pustaka

- Abdullah (1991). *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia
- Alfian. (1969). *Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslem Modernist Organizer Under Dutch Colonialism 1912-1942*. Amerika Serikat: Disertasi di University Wisconsin.
- Almon, Gabriel A. And G Bingham Powell, Jr, (1976). *Comparative Politics: A Developmental Approach*, (New Delhi: oxford & IBH Publishing Co.
- Djaelani, Abdul Qadir. (1994). *Sekitar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Medya Dakwah
- Effendy, Bahtiar (1998). *Islam Dan Negara*, Jakarta: Paramadina

- Efzioni, Amitai. (1982). *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: Penerbit UI dan Radjaguna.
- Gaffar, Affan (1995). *Moralitas Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Dinamika.
- Giddens, Anthony (1993). *Sociology*. Cambridge: Polity Press
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i (1988). *Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press
- Mulkhan, Abul Munir (1990). *Pemikiran K.H.A. Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bima Aksara
- Pulungan, Abbas (2008). *Agama dalam Otonomi Daerah: Studi Tentang Isu Agama dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara*. Jurnal Penelitian Medan Agama, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 9(2)
- Sanit, Arbi. (2002). *Ormas dan Politik*. Jakarta: LSIP
- Shihab, Alwi (1999). *Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristenisasi di Indonesia*. Amerika Serikat: Disertasi.
- Suminto, Aqib (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES
- Uhlir, Anders (1998). *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan.